

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, M. Syukur. (1986). *Perkembangan dan penerapan studi implementasi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Latihan Pegawai Negeri.
- Abidin, S.Z.(2006). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Penerbit Suara Bebas.
- Adi, I.R. (2005). *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. (1992). *Pengantar metode penelitian kualitatif: Suatu pendekatan fenomenologis terhadap ilmu-ilmu sosial*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persona.
- Darwin, Muhadjir, DR. (2001). *Analisis kebijakan publik, kerangka analisis dan prosedur perumusan masalah*. Yogyakarta : Hanindita Graha Widia.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho.(2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gramedia.
- Erwan, Agus.(2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta : Gavamedia.
- Hasan,Iqbal.(2004). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Irawan, P. (2007). *Metode Penelitian Administratif*. Jakarta : Universitas Terbuka-Departemen Pendidikan Nasional.
- Islamy, Irfan. (2001). *Prinsip-prinsip perumusan kebijakan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Mayer, Robert R. dan Greenwood, Ernest. (1984). *Rancangan penelitian kebijakan sosial*. Jakarta: CV Rajawali.
- Nugroho, R. (2009). *Public policy*. Jakarta : PT. Elex Media Koimputindo.
- Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Chicago-Illinois: The Dorsey Press.
- Sabatier, Paul and Mazmanian, Daniel. (1986). *Top down and bottom up approach to implementation research, a critical analysis and suggested synthesis*. In Journal of Public Policy.Vol.6.

- Santosa, Purwo (eds). (2004). *Menembus ortodoksi kajian kebijakan publik*. Yogyakarta: Fisipol UGM.
- Subarsono,AG.(2008). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.(2011). *Metode Penelitian Administrasi : Dilengkapi dengan Metode R&D*.Bandung : Alfabeta.
- Suwitri, Sri.(2010). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Van Meter, Donalds dan Van Horn, Carl E. (1975). *The policy implementation process: aconceptual framework*. Administration and Society,Vol.6,No.4.
- Wahab, Solichin Abdul. (2003). *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi.(2007). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.Yogyakarta : Penerbit Media Pressindo.

## **JURNAL**

- Alisjahbana,Armida Salsiah.(2018).*Menyongsong SDGs Kesiapan Daerah-Daerah Di Indonesia*.Cetakan.2.Unpad Press Graha Kandaga: Bandung. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 09.00 WIB).
- Astuti, W. (2019). Housing Tenure Security in Rtlh Program of Surakarta Indonesia-How Can It Contribute To Achieve Sustainable Development Goals of Post-2015 Agenda? *Journal of Architecture&ENVIRONMENT*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.12962/j2355262x.v18i1.a4933>. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 09.10 WIB).
- Dewi, N. K., Anggraeni, M., & Dwimawanti, I. H. (2018). Implementasi Program Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Di Desa Ngotet Kab. Rembang Tahun 2017. *Gema Publica*, 3(1), 26. <https://doi.org/10.14710/gp.3.1.2018.26-35>. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 09.15 WIB).
- Haryati Roebyantho, N. U. (2014). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan melalui Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh ), Di Kota Garut , Provinsi Jawa Barat Implementation of Poverty Alleviation Policy Through Social Rehabilitation for Adequate Dwelling in Ga.

*Sosio Konsepsia*, 4(1), 311–330.  
<https://media.neliti.com/media/publications/52922-ID-implementasi-kebijakan-penanggulangan-ke.pdf>. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 09.20 WIB).

Ismowati, M., & Subhan, A. (2018). Implementasi Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rtlh) Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Pandeglang. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 1(2), 194–205. <https://doi.org/10.31334/trans.v1i2.384>. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 09.25 WIB).

Madalina, M., Purwadi, H., Firdausy, A. G., & . A. (2018). the Pattern of Adequate Housing Rights Fulfillment in Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 7(2), 376. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v7i2.13122>. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 10.05 WIB).

Nada Kamilia, Syamsir, N. E. P. (2019). *Pelaksanaan Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( Rtlh ) Di Kelurahan Aie Pacah*. 3, 272–279. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 10.00 WIB).

Perera, T., Weerasoori, I., & Karunaratne, H. (2011). An Evaluation of Success and Failures in Hambantota , Siribopura Resettlement Housing Program: Lessons Learned. *Sri Lankan Journal of Real Estate*, 06, 1–15. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 10.30 WIB).

Prakoso, C. T., Sari, I. A., Kebijakan, I., Rehabilitas, T., Layak, T., Di, H., Perjiwa, D., Tenggara, K., & Kutai, S. (2018). *Ika Amelia Sari 1*. 6, 8299–8313. (Diakses pada tanggal 10 November 2020 Pukul 11.00 WIB).

Santosa, H., & Astuti, W. (2009). Comprehensive kampung improvement programme to support better settlement and poverty reduction. *CIB Working Commission W110 Informal Settlements and Affordable Housing*, II–123. (Diakses pada tanggal 12 November 2020 Pukul 10.00 WIB).

Yuliasuti, N., & Widiastomo, Y. (2015). Towards better social housing policy based on residents' satisfaction: A case study at Sendangmulyo, Semarang, Indonesia. *Journal of Sustainable Development*, 8(2), 149–160. <https://doi.org/10.5539/jsd.v8n2p149>. (Diakses pada tanggal 11 November 2020 Pukul 09.00 WIB).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Permensos Rutilahu dan Sarling)

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 13 A Tahun 2017 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Semarang

**WEB RESMI DINAS**

<http://disperakim.jatengprov.go.id/>. (Diakses pada tanggal 13 November 2020 Pukul 21.00 WIB).

<http://disperkim.semarangkota.go.id/>. (Diakses pada tanggal 13 November 2020 Pukul 20.00 WIB).

<http://trimulyo.semarangkota.go.id/>. (Diakses pada tanggal 12 Desember 2020 Pukul 10.00 WIB).